

## BAB IV

### ANALISIS

#### **A. Analisis Strategi Komunikasi Humas Pemkab Jepara Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Jepara (Studi Kasus Sexy Dancer di HUT NMax Owner Jepara)**

##### **1. Strategi komunikasi**

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan sebagai penunjang utama dalam proses pembentukan citra Pemerintah Kabupaten Jepara. Strategi komunikasi memiliki tujuan-tujuan dalam membentuk citra positif pemerintahan. Tujuan strategi komunikasi adalah memberitahu (*Announcing*), memotivasi (*Motivating*), mendidik (*Educating*), menyebarkan Informasi (*Informing*), mendukung Pembuatan Keputusan (*Supporting Decision Making*).

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, setelah terjadinya peristiwa *sexy dancer* peneliti menemukan beberapa tujuan-tujuan strategi komunikasi yang telah dicapai oleh Dinas Kominfo agar citra positif didapat pemerintah. Terdapat dua bentuk kegiatan strategi komunikasi, yaitu

##### **a. Mengerahkan tenaga liputan**

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Kominfo adalah mengumpulkan informasi melalui tenaga liputan yang dimiliki

Dinas Kominfo sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Arif Darmawan selaku Kepala bidang komunikasi Dinas Kominfo Jepara.

“Tenaga liputan kami mencari konten-konten yang ada di lapangan.”<sup>96</sup>

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan Dinas Kominfo dengan mengerahkan tenaga liputan dimaksudkan agar dinas dapat meningkatkan kemungkinan besar mendapatkan berbagai informasi terkait peristiwa *sexy dancer*. Sedangkan tenaga liputan mewawancarai Bupati Jepara setelah peristiwa *sexy dancer* agar mendapatkan informasi dari pihak pemerintahan. Setelah mendapatkan informasi tenaga liputan dengan membuat berita sikap pemerintah Kabupaten Jepara tentang adanya peristiwa *sexy dancer* dalam HUT NMax Owner.

Dari narasi di atas dapat dikatakan bahwa tenaga liputan sudah terencana dalam mencari berita. Walau sudah terencana dalam mencari berita, menurut peneliti dalam membuat berita tenaga liputan juga harus berfokus mengawal proses hukum *sexy dancer* sampai tuntas agar pemerintah mengetahui lebih dalam akar permasalahan dan kejelasan mengenai peristiwa tersebut. Hasil observasi dan penelusuran dokumentasi yang peneliti lakukan, media massa Jawa Pos merilis berita pada 30 Agustus 2018 tentang vonis para *sexy dancer* dan panitia penyelenggara, artinya adalah bahwa media-media massa lebih fokus mengawal peristiwa *sexy dancer* yaitu media-media mengawal pemberitaan proses hukum yang dijalani oleh panitia *sexy dancer*.

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Darmawan, Ketua Bidang Komunikasi Dinas Kominfo Jepara pada 25 Februari 2019 pukul 09:40 di Kantor Diskominfo Jepara.

Tenaga liputan Dinas Kominfo mencari berita tentang peristiwa *sexy dancer* yang terjadi sangatlah penting mengingat setelah peristiwa terjadi berbagai pihak beramai-ramai menyayangkan peristiwa tersebut sehingga menjadi sorotan. Pemberitaan yang ada bahkan sampai menjadi berita nasional yaitu di TV One.<sup>97</sup> Agar dapat mencapai tujuan dari strategi komunikasi maka kedalaman berita yang Dinas Kominfo cari di lapangan harus terpenuhi karena mencapai tujuan komunikasi akan berdampak signifikan terhadap pemerintahan.

Berkaitan dengan proses audiensi meminta izin menyelenggarakan acara, 'H' menyebutkan bahwa audiensi yang dilakukan oleh pihak panitia berjumlah dua kali. Audiensi *Pertama* dengan Bupati Jepara dan *Kedua* dengan Wakil Bupati Jepara. Panitia NMax Owner Jepara selama beraudiensi menyebutkan menggelar acara di Pantai Kartini hanya diisi oleh acara musik. Dalam hal izin dari pemerintah 'H' mengakui bahwa dari panitia tidak menyebutkan dari awal untuk mendatangkan *sexy dancer*. Selain itu, panitia juga mengakui menambahkan nama bupati sebagai Pembina NMax Owner. 'H' menuturkan bahwa sudah mempertimbangkan pertunjukan *sexy dancer* yang digelar dengan sedikit menutup tubuh para *sexy dancer* dengan ditutup selendang akan tetapi pada sesi kedua yaitu sesi

---

<sup>97</sup> Peneliti mendapatkan video tayangan peristiwa *sexy dancer* di *channel Youtube tvOneNews*. Video dirilis pada tanggal 16 April 2018 dan video penetapan tersangka di *akun facebook tvOneNews* pada 17 April 2018.

menyemprotkan air selendang dibuka dan *sexy dancer* menari erotis sepanjang acara.<sup>98</sup>

Berdasarkan narasi di atas terdapat kecurangan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara, dalam berita Jawa Pos tanggal 15 April 2018 Manajer Pantai Kartini tidak mengetahui akan adanya pertunjukan DJ dan *sexy dancer*. Dan dalam berita Jawa Pos tanggal 17 April 2018 Bupati Jepara beraudiensi tetapi panitia acara memberi keterangan yang berbeda dan juga mengaku ingin menjadi promotor dan mempromosikan pariwisata. Padahal dalam audiensi disebutkan bahwa pihak panitia tidak menyampaikan *sexy dancer* akan didatangkan pada acara, sedangkan dari pihak pemerintahan tidak menanyakan tentang adanya *sexy dancer*. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah lebih detail dalam menanyakan mengenai suatu komunitas yang ingin menyelenggarakan acara karena pemerintah yang berhak memberi izin atau tidaknya. Selain detail, pemerintah harus mengetahui hal-hal yang identik dengan acara motor atau mobil yaitu mendatangkan *sexy dancer*. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan pengetahuan kepada panitia acara NMax bahwa *sexy dancer* merupakan suatu yang melanggar hukum. Dengan adanya pemberian pengetahuan maka tindakan melanggar hukum dapat dicegah.

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan 'H', panitia acara *sexy dancer* NMax Owner di Pantai Kartini pada hari Kamis 21 Februari 2019 pukul 10:40 di Rumah Tahanan Jepara.

b. Membagikan berita

Strategi yang dilakukan Dinas Kominfo selanjutnya adalah membagikan konten sebagaimana wawancara peneliti dengan Arif Darmawan selaku Kepala bidang komunikasi Dinas Kominfo Jepara.

“....setelah itu kami bagikan konten-konten yang sudah didapat kepada rekan-rekan media.”<sup>99</sup>

Berdasarkan dokumentasi dan wawancara dengan Dinas Kominfo, Dinas Kominfo membagikan konten yaitu berita sikap pemerintah terhadap peristiwa *sexy dancer*. Berita dibagikan kepada media-media resmi yang ada di Jepara, seperti Jawa Pos dan Suara Merdeka. Selain itu, dinas juga membagikan berita kepada radio-radio yang ada di Jepara, yaitu radio Kartini, radio R-Lisa, dan radio Pop.

Pernyataan sikap pemerintah yang ditulis oleh tenaga liputan dikirim ke media-media untuk dijadikan pemberitaan di media-media tersebut. Terdapat hubungan timbal balik antara dinas dengan media-media, yaitu berita tentang sikap pemerintahan dapat disebarluaskan secara cepat dan massif oleh media-media dan media-media mendapatkan berita dari dinas.

Menurut peneliti, strategi dinas dalam menangani kasus *sexy dancer* seharusnya tidak hanya mengerahkan tenaga liputan dan membagikan berita, akan tetapi dalam mencapai tujuan strategi komunikasi harus lebih komprehensif, seperti analisis teks-teks ataupun

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Darmawan, Ketua Bidang Komunikasi Dinas Kominfo Jepara pada 25 Februari 2019 pukul 09:40 di Kantor Diskominfo Jepara.

video tentang *sexy dancer* di Pantai Kartini yang telah beredar luas di masyarakat.

Secara hukum *sexy dancer* melanggar undang-undang nomor 44 tahun 2008 karena termasuk ke dalam pornografi yaitu mempertontonkan eksploitasi dan seksualitas wanita di depan umum, selain itu *sexy dancer* juga melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat seperti norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan.

Dalam wawancara dengan pria berinisial 'H' selaku panitia dan pengurus NMax Owner, Sexy dancer selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dalam sebuah acara klub motor atau mobil. Menurut 'H' yang merupakan panitia dan pengurus NMax Owner dirinya selama ini mengunjungi berbagai acara motor atau mobil di sejumlah daerah di Indonesia tidak pernah menemukan bahwa *sexy dancer* dilarang dan dijebloskan ke penjara. Setiap acara yang ia datangi selalu berjalan dengan lancar dan tidak ada apa-apa. 'H' selama ini tidak mengetahui bahwa *sexy dancer* melanggar hukum, apabila ia mengetahui sedari awal ia tidak berani ikut menjadi pihak yang mendatangkan *sexy dancer*.<sup>100</sup>

Dalam keterangan 'H' dapat dikatakan bahwa selama ini di dalam masyarakat *sexy dancer* dianggap sebagai hal yang wajar di dalam suatu acara motor atau mobil. Dan masyarakat bahkan panitia penyelenggara acara tidak mengetahui bahwa *sexy dancer* melanggar

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan 'H', panitia acara sexy dancer NMax Owner di Pantai Kartini pada hari Kamis 21 Februari 2019 pukul 10:40 di Rumah Tahanan Jepara.

hukum, se usai terjadinya peristiwa tersebut masyarakat mulai banyak yang tahu. Artinya banyak masyarakat belum memahami dan teredukasi lebih mendalam tentang hal-hal yang melanggar hukum.

Peneliti mendapatkan fakta bahwa penangkapan panitia penyelenggara sexy dancer hanya sebagian kecil yaitu 'H', 'ES', 'GPH', dan 'AF', tidak sebanyak panitia yang ada padahal panitia yang ada mencapai 80 orang dan semuanya mengetahui bahwa sedari awal akan mendatangkan *sexy dancer*.

Dalam himbauan kepada masyarakat, peneliti menemukan himbauan untuk menghentikan penyebaran video *sexy dancer* pada berita Jawa Pos tanggal 17 April 2018. Himbauan penghentian penyebaran video seharusnya massif dilakukan oleh pemerintah karena mengingat video tersebut yang sangat kental dengan nuansa pornografi. Hal ini karena penyebaran video tersebut dapat melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11 tahun 2008 karena menyebarkan video berbau pornografi.

Peneliti merasa adanya hal yang kurang dalam merilis atau membagikan berita yaitu hanya dibagikan kepada media-media, seharusnya Dinas Kominfo lebih dahulu merilis berita melalui *website* dinas ataupun *website* pemerintah. Hal ini dikarenakan dinas telah mendapatkan berita di lapangan dan kinerjanya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan tidak bias antara pemberitaan dari dinas dan murni dari media-media. Peneliti juga tidak menemukan klarifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo di *website* atau di media sosialnya.

Dalam hal ini, dinas diharapkan lebih berfokus kepada melindungi persepsi atau pandangan masyarakat terhadap pemerintahan dengan klarifikasi yang ada di *website* ataupun media sosialnya agar masyarakat tidak berpandangan negatif terhadap pemerintah yang tidak merilis klarifikasinya di *website* ataupun media sosial yang dimiliki oleh pemerintah.

Dibandingkan dengan penanganan kasus antara Pemerintah Provinsi Bali dengan media Bali Post. Kasus yang terjadi adalah perseteruan media terbesar Bali yaitu Bali Post memberitakan “hal yang negatif” tentang Gubernur Bali yang terjadi pada tahun 2012. Dalam penanganan kasus tersebut Humas menggunakan media massa sebagai mitra dan juga menggunakan media *Online* seperti *Website* pemerintah dan juga portal-portal *online* yang berbasis di Bali, Tidak hanya itu penggunaan media seperti media internal, poster dan baliho juga dipergunakan sesuai dengan target pesan yang dituju. Selain dalam melakukan pemilihan media, humas memiliki cara yang digunakan oleh humas dalam melakukan strategi. Cara ini disebut sebagai *humanity* yang menerapkan hubungan kekerabatan antar sesama anggota organisasi yaitu humas melakukan *media relations* untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan para media.<sup>101</sup>

Dalam uraian di atas jelas bahwa humas Pemerintah Bali melakukan penanganan kasus secara terencana dengan baik yaitu

---

<sup>101</sup> Gusti Ngurah Agus Adi Putra dan Ninik Sri Rejeki, *loc. cit.*

melalui rilis media massa maupun menggunakan media eksternal yaitu poster dan baliho. Dan juga menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan media massa. Penanganan ini menurut peneliti penanganan kasus yang ideal untuk kasus pemulihan citra yang sama dengan yang ada di Jepara.

Dalam hal lain, Peneliti menyoroti tentang sikap yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti MUI, KNPI, GP Ansor Kabupaten Jepara yang dinilai cepat tanggap untuk bereaksi terhadap peristiwa *sexy dancer*. GP Ansor merilis pernyataan sikap pada tanggal 15 April 2018 di akun *facebook*-nya, KNPI bersama Kapolres menyampaikan protes yang dirilis oleh Jawa Pos pada 17 April 2018, dan MUI Kabupaten Jepara menyampaikan protes pada yang dirilis 17 April 2018. Tiga organisasi masyarakat mewakili masyarakat menyampaikan rasa prihatin terhadap peristiwa tersebut karena sangat merugikan masyarakat Jepara dan citra Kabupaten Jepara dimata masyarakat. Ini menandakan masyarakat sangat aktif dalam menolak kegiatan yang menyimpang di masyarakat.

Pemberitaan negatif tentang *sexy dancer* di Pantai Kartini Jepara merupakan suatu kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Jepara pada khususnya. Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan Hari Isra' Mi'raj, Hari Ulang Tahun Kabupaten Jepara, dan Hari Kartini.

Dalam wawancara dengan Kepala bidang komunikasi Dinas Kominfo, adanya peristiwa *sexy dancer* pemerintah sangat menyangkan sekali acara *sexy dancer* dapat terjadi karena dengan

peristiwa tersebut dapat mencoreng nama baik dari Pemerintah Kabupaten Jepara. Pemerintah merasa dicurangi oleh panitia penyelenggara acara HUT NMax Owner yang telah sengaja melanggar izin yang sudah diberikan terkait penyelenggaraan acara. Dengan adanya peristiwa seperti ini menjadi kewaspadaan bagi pemerintahan dan masyarakat agar tidak terjadi kembali. Dari pihak pemerintah yang sebelumnya beraudiensi dengan panitia NMax juga mengatakan bahwa acara yang diagendakan adalah acara musik tetapi realitanya adalah menyisipkan *sexy dancer* di tengah acara.<sup>102</sup>

Fakta yang peneliti dapatkan setelah peristiwa *sexy dancer*, selain menuai protes dari berbagai organisasi masyarakat, peristiwa ini juga menuai demonstrasi yang dilakukan di bundaran tugu kartini Jalan Pemuda Kabupaten Jepara. Acara tersebut yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang dirugikan tetapi nama baik dari Kabupaten Jepara dipertaruhkan. Hal ini sampai terjadi karena adanya *sexy dancer* bertepatan dengan Hari Peringatan Isra' Mi'raj, Hari Kartini, dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Jepara.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa *sexy dancer* sangat bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang ada. Oleh karena itu, bertepatan dengan peringatan Hari Isra' Mi'raj yang merupakan hari sakral bagi umat Islam dimana hari tersebut merupakan hari dimana Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk sholat. Selain itu, bertepatan dengan HUT Jepara dan Hari Kartini yang sangat melukai

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Darmawan, Ketua Bidang Komunikasi Dinas Kominfo Jepara pada 25 Februari 2019 pukul 09:40 di Kantor Diskominfo Jepara.

hati masyarakat karena HUT Jepara merupakan hari dimana masyarakat dengan suka cita merayakan hari berdirinya Jepara dan Hari Kartini yang merupakan hari memperingati sosok R.A. Kartini Pahlawan Emansipasi Wanita dari Jepara.

Peristiwa *sexy dancer* tidak hanya bertepatan dengan peringatan hari-hari penting saja akan tetapi peneliti menemukan fakta bahwa sebelum terjadi peristiwa *sexy dancer*, terdapat peristiwa pembunuhan akibat kerusuhan dari musik orkes yang diselenggarakan di Desa Mantingan pada tanggal 6 April 2018. Para penggiat seni khususnya PAMMI<sup>103</sup> dan masyarakat menyayangkan sekali karena setelah adanya pembunuhan yang diakibatkan dampak dari musik orkes, *sexy dancer* justruizinkan oleh pemerintah. Pandangan masyarakat menjadi negatif kepada pemerintah.

Tugas Dinas Kominfo sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika merupakan ujung tombak bagi komunikasi pemerintahan dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan informasi tersebut sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja dimata masyarakat.

Peneliti melihat adanya rekayasa sosial yang digunakan dalam menangani peristiwa tersebut. Dinas Kominfo telah menggunakan rekayasa sosial berupa rekayasa sosial dengan strategi persuasif yaitu strategi yang di dalamnya menggunakan media massa. Media massa merupakan media yang strategis digunakan karena jangkauan yang luas

---

<sup>103</sup> Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia.

dan cepat sehingga dampaknya signifikan terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Dengan media massa pula masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih efektif dan efisien. Peneliti mengungkapkan alasan Dinas Kominfo menggunakan strategi persuasif dalam menjalankan rekayasa sosial adalah sebagai berikut:

Dinas Kominfo dapat membentuk opini dan pandangan masyarakat mengenai pemerintahan dengan menggunakan media massa. Dinas Kominfo juga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari juga ditunjang oleh media *online*. Di era sekarang pemerintahan dituntut untuk aktif di media *online*. Setiap hari kegiatan kehumasan yaitu memberikan informasi di media sosial seperti *instagram*, *twitter*, *facebook*, Radio Kartini, dan informasi berkala dimajalah Gelora.<sup>104</sup> Menurut peneliti kegiatan ini dilakukan agar dapat membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga mendapatkan citra yang baik.

## **2. Proses Pembentukan Citra**

Berdasarkan unsur-unsur yang dimiliki oleh citra yaitu pengetahuan atau pengalaman (*knowledge*), afeksi atau perasaan (*affection*), nilai (*value*), dan kepercayaan (*belief*).<sup>105</sup> Peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut:

a. Proses pembentukan citra negatif adanya peristiwa *sexy dancer* adalah sebagai berikut:

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Arif Darmawan, Ketua Bidang Komunikasi Dinas Kominfo Jepara pada 25 Februari 2019 pukul 09:40 di Kantor Diskominfo Jepara.

<sup>105</sup> Poppy Ruliana, *loc. cit.*

Di bawah ini adalah empat unsur-unsur citra yaitu:

*Knowledge*, pengetahuan atau pengalaman yang didapat oleh masyarakat adalah berita tentang *sexy dancer* yang terdapat diberbagai media baik cetak maupun elektronik.

*Affection*, perasaan yang didapat oleh masyarakat karena pengetahuan yang didapatkan. Setelah masyarakat mendapatkan informasi tentang *sexy dancer* maka, pengetahuan akan memunculkan perasaan oleh masyarakat. Perasaan yang dirasakan oleh masyarakat adalah kecewa dan sangat terlukai karena *sexy dancer* merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik Jepara.

*Value*, nilai dapat disebutkan bahwa peristiwa *sexy dancer* melanggar hukum, norma, dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat.

*Belief*, dalam kepercayaan masyarakat meyakini bahwa *sexy dancer* sangat merugikan masyarakat karena dapat merusak tatanan sosial-kemasyarakatan. Selain itu, berkenaan masyarakat kepercayaan dengan agama, *sexy dancer* melanggar norma agama.

Proses pembentukan citra adalah stimulus yang berasal dari luar diorganisasikan dalam mempengaruhi respon. Berikut ini adalah empat komponen terbentuknya citra negatif setelah peristiwa *sexy dancer*:

*Persepsi*, pengalaman atau pandangan negatif oleh individu karena berita *sexy dancer* yang sangat merugikan masyarakat. Pemerintah dinilai mengizinkan adanya acara *sexy dancer*.

*Kognisi*, keyakinan diri dari individu terhadap berita *sexy dancer* bahwa *sexy dancer* telah merugikan masyarakat, melanggar hukum dan norma, dan mencoreng nama baik Jepara.

*Motivasi*, keadaan individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Masyarakat perlu melakukan penolakan *sexy dancer* agar masyarakat tidak dirugikan lagi dan kasus hukum dapat diatasi secara tuntas.

*Sikap*, tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi masyarakat adalah melakukan protes dan demonstrasi menuntut *sexy dancer* diusut tuntas dan diproses secara hukum.

Berdasarkan pemaparan komponen pembentukan citra, pembentukan citra negatif yang terjadi adalah respon negatif terhadap pemerintah dan pemerintah mengalami penurunan citra positif. Penurunan citra ini karena pemerintah dinilai mengizinkan acara HUT NMax menggunakan *sexy dancer* dan berdampak pada pandangan masyarakat tentang pemerintah.

b. Proses peningkatan citra oleh Pemerintah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Untuk menanggulangi penurunan citra yang dialami oleh pemerintah maka, pemerintah dalam hal ini Dinas Kominfo menggunakan strategi komunikasi mengerahkan tenaga liputan dan membagikan berita. Membagikan berita secara cepat dan massif oleh media-media yang ada membantu kinerja Dinas Kominfo dalam

menyebarkan sikap Pemerintah Kabupaten Jepara. Berikut ini adalah empat unsur-unsur citra yaitu:

*Knowledge*, pengetahuan atau pengalaman yang didapat oleh masyarakat adalah berita tentang *sexy dancer* yang disebarkan oleh media-media bahwa pemerintah dicurangi oleh panitia NMax Owner dalam mendatangkan *sexy dancer*.

*Affection*, perasaan yang didapat oleh masyarakat karena pengetahuan yang didapatkan. Setelah masyarakat mendapatkan informasi tentang *sexy dancer* maka, pengetahuan akan memunculkan perasaan oleh masyarakat. Masyarakat merasa lega karena pemerintah telah menyikapi *sexy dancer* dan masyarakat dapat merasakan kinerja dari pemerintahan.

*Value*, nilai dapat disebutkan bahwa peristiwa *sexy dancer* melanggar hukum, norma, dan nilai-nilai sosial yang ada dimasyarakat. Kasus *sexy dancer* telah diselesaikan dengan baik oleh pemerintah dan panitia telah dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan pada 30 Agustus 2018.

*Belief*, dalam kepercayaan masyarakat meyakini bahwa *sexy dancer* sangat merugikan masyarakat karena dapat merusak tatanan sosial-kemasyarakatan. Masyarakat percaya dengan kinerja pemerintahan yang dengan cepat mengurus kasus *sexy dancer*.

Proses pembentukan citra adalah stimulus yang berasal dari luar diorganisasikan dalam mempengaruhi respon. Berikut ini adalah empat

komponen pembentukan citra positif setelah penanganan peristiwa *sexy dancer*:

*Persepsi*, pengalaman atau pandangan positif oleh individu karena pemerintah dicurangi oleh pihak panitia dan kasus *sexy dancer* yang sangat merugikan masyarakat telah diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah dengan menahan pelaku ke dalam Rumah Tahanan Jepara pada 30 Agustus 2018.

*Kognisi*, keyakinan diri dari individu terhadap pemerintah yang telah tuntas menyelesaikan kasus *sexy dancer*.

*Motivasi*, keadaan individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Masyarakat perlu melakukan menjaga kondusifitas atau kenyamanan di dalam masyarakat agar tidak terjadi peristiwa serupa.

*Sikap*, tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi masyarakat adalah mempercayai Pemerintah Kabupaten Jepara karena kinerja baik yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pemaparan komponen pembentukan citra, pembentukan citra positif yang terjadi adalah respon positif masyarakat terhadap pemerintah dan pemerintah mendapatkan citra positif. Peningkatan citra ini karena pemerintah dinilai oleh masyarakat telah mampu mengatasi kasus *sexy dancer* secara tuntas dan telah memasukkan pelaku-pelaku yang bersangkutan ke dalam lembaga pemasyarakatan yaitu Rumah Tahanan Jepara pada 30 Agustus 2018.